

Article

## Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19

Wiwiek Rukmi Dwi Astuti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

---

### SUBMISSION TRACK

Received : 26 August 2020  
Final Revision : 12 Sept 2020  
Available Online : 30 November 2020

---

### KEYWORD

G20, covid 19, global economic recovery

---

### KATA KUNCI

G20, covid 19, pemulihan ekonomi global

---

### CORRESPONDENCE

E-mail : [wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id](mailto:wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id)

---

### ABSTRACT

The G20 is an international cooperation forum that is informal, non-institutionalized, and does not have an accountability mechanism. However, the G20 has the distinction of being the main center for international economic cooperation among member countries on a permanent basis. This research answers the institutional performance of the G20 in efforts to recover the global economy from COVID-19. This study uses qualitative methods, internet-based data collection, and the concept of a systemic hub model to explain G20 governance. The results of this study indicate that the G20 has proven its performance in performing multilateral cooperation system through collective responses. G20 present professional response and consensus by defining international measures that are promoted consistently. Coordination and evaluation of differences in the capacities of each member are carried out to measure the accuracy of the steps taken by G20 member countries. Compliance with G20 member countries will draw the similar approach from non-G20 member countries. Ultimately, coordination by the G20 created a global network that includes interactions between international institutions, namely the IMF, WTO, and World Bank, as well as regional organizations and informal partnerships in the arena of international cooperation.

---

### ABSTRAK

G20 merupakan forum kerja sama internasional yang bersifat informal, tidak terinstitusionalisasi, dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas. Namun, G20 memiliki keistimewaan tersendiri sebagai pusat utama dalam kerja sama ekonomi internasional di antara para negara anggota secara permanen. Penelitian ini menjawab kinerja institusional G20 dalam upaya pemulihan ekonomi global dari COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data internet-based, dan konsep systemic hub model untuk menjelaskan tata kelola G20. Hasil penelitian ini menunjukkan G20 membuktikan performanya dalam menjalankan sistem kerja sama multilateral melalui tanggapan kolektif. G20 menunjukkan respon dan konsensus secara profesional dengan menetapkan international measure yang dipromosikan secara konsisten. Koordinasi dan evaluasi terhadap perbedaan kapasitas setiap anggota dilaksanakan untuk mengukur ketepatan langkah negara anggota G20. Kepatuhan negara anggota G20 yang akan menarik langkah dan penanganan yang sama dari negara non-anggota G20. Pada akhirnya, koordinasi oleh G20 menciptakan suatu jaringan global yang meliputi interaksi antara institusi internasional yaitu IMF, WTO, dan Bank Dunia, serta organisasi regional dan kemitraan informal di arena kerja sama internasional.

## Pendahuluan

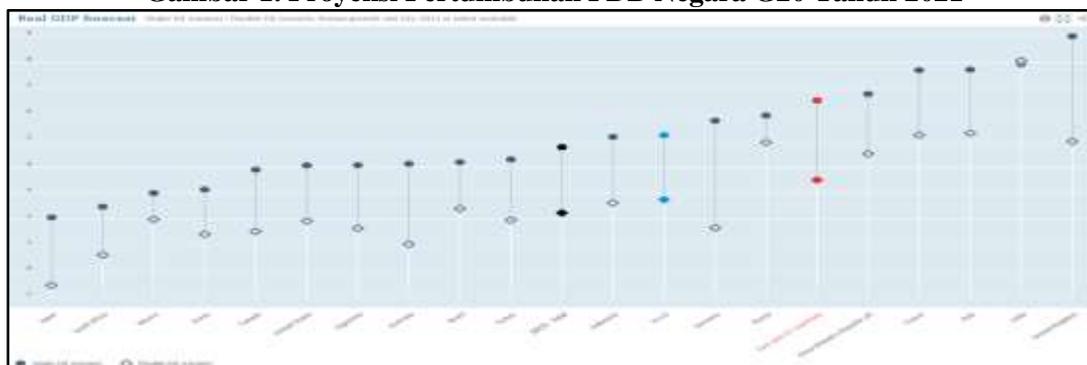
COVID-19, singkatan dari *coronavirus disease 2019*, telah menjadi pandemi global sejak bulan Maret 2020. Mayoritas negara di seluruh dunia yang terjangkit COVID-19 mengambil kebijakan darurat sebagai upaya untuk mencegah peningkatan angka penyebaran dan kematian warga negaranya. *Social & physical distancing, lockdown & shutdown* atau karantina/penutupan wilayah menjadi kebijakan yang hampir diterapkan oleh semua negara dalam menghadapi pandemi tersebut. Hasilnya, resesi ekonomi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, berikut dengan berbagai permasalahan sosial yang kompleks.

Dalam *Global Economic Prospects June 2020*, Bank Dunia memperkirakan penyusutan ekonomi global pada tahun 2020 mencapai angka 5,2%. Angka ini merupakan resesi paling parah sejak Perang Dunia Kedua, dengan angka penurunan terbesar sejak tahun 1870.<sup>1</sup> Dengan ancaman penularan virus yang belum dapat dikontrol, tindakan agresif negara dalam rangka melindungi warga negaranya telah mengguncang segala sektor aktivitas perekonomian, sehingga berpengaruh terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas, dan pembiayaan

eksternal. Kerentanan negara cukup bervariasi, namun bagi negara berkembang, secara umum memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap guncangan eksternal.

Hal serupa diilustrasikan dalam *OECD Economic Outlook June 2020* yang menyatakan bahwa perekonomian dunia sedang dalam keadaan sulit, dan prospek global sifatnya sangat tidak pasti (*highly uncertain*). Dalam laporannya, OECD membuat dua skenario yaitu *single-hit* dan *double-hit* dalam proyeksi pertumbuhan PDB. Skenario *single-hit* digambarkan sebagai kondisi hasil penanggulangan negara saat ini, yaitu upaya karantina wilayah yang berhasil, namun di saat bersamaan juga terpaksa membekukan kegiatan bisnis di berbagai sektor, memperlebar ketidaksetaraan (*inequality*), terganggunya pendidikan, dan rusaknya kepercayaan terhadap masa depan. Lalu, skenario *double-hit* merupakan kondisi yang dihasilkan oleh penghapusan atau kelonggaran pemerintah atas batasan sebelumnya, sehingga probabilitas penularan COVID-19 semakin meningkat, dan pemulihan ekonomi tetap berjalan tanpa kepastian.<sup>2</sup>

**Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan PDB Negara G20 Tahun 2021**



Sumber: OECD, (2020), Real GDP forecast (indicator). doi: 10.1787/1f84150b-en (Diakses pada 23 Juli 2020)

<sup>1</sup> World Bank. 2020. COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II [Press Release]. June 8. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>.

<sup>2</sup> OECD. 2020. Real GDP forecast. July 23. <https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm>.

Proyeksi ekonomi global berkisar di 5,2% saat diasumsikan tidak ada gelombang baru pandemi COVID-19, alias dalam skenario *single-hit*. Namun, apabila pandemi makin parah maka kontraksi ekonomi dunia akan semakin parah, yaitu 2,8% (lihat Gambar 1). Lebih jauh, dapat dilihat posisi Indonesia, yaitu berkisar di angka 5,2% (skenario *single-hit*), dan 2,6% (skenario *double-hit*). Jadi, angka-angka tersebut mendekati dengan angka rata-rata proyeksi ekonomi dunia. Sementara itu, untuk negara area Euro diproyeksi tumbuh 3,4% hingga 6,5%, sementara Inggris lebih tinggi yaitu antara 5% hingga 9%.

Seiring dengan hal di atas, IMF dalam *World Economic Outlook June 2020*, menyebutkan pertumbuhan global diproyeksikan sebesar -4,9% pada tahun 2020. Dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang lebih negatif pada aktivitas pada paruh pertama 2020 daripada yang diperkirakan, sehingga pemulihan diproyeksikan akan lebih bertahap dari perkiraan sebelumnya.<sup>3</sup> Pada 2021 pertumbuhan global diproyeksikan naik sebesar 5,4%. Secara keseluruhan, hal tersebut akan membuat PDB 2021 sekitar 6,5 poin persentase lebih rendah daripada dalam proyeksi pra-COVID-19 pada Januari 2020.<sup>4</sup> Angka proyeksi tersebut akan berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan warga negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Rumah tangga yang berpenghasilan rendah akan mengalami penurunan kesejahteraan akut.

Resiko dan ancaman besar terhadap keamanan manusia telah mendorong negara untuk mendominasi dan melindungi warga negaranya. Langkah-langkah yang diambil

oleh negara adalah respon dari kontrak sosial, yang mana titik kulminasi tertinggi adalah ketika warga memberikan haknya untuk diatur oleh negara. Sehingga, upaya negara dalam memitigasi pandemi perlu diimplementasikan mulai dari entitas terkecil dari elemen masyarakat, hingga level internasional.

*Group of Twenty* (G20), merupakan kelompok negara yang komposisi keanggotaannya dilihat sebagai suatu keseimbangan antara efisiensi dan keterwakilan. IMF mengkategorikan keanggotaan negara anggota G20 ke dalam 4 kategori (Tabel 1). Berdasarkan sejarah pembentukannya, forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, dibentuk oleh forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7, sebagai dialog informal dalam kerangka sistem institusional Bretton Woods (IMF, WTO, World Bank) pada tahun 1999. Kemudian, sejak G20 terbentuk di level KTT, terjadi peningkatan pembentukan forum menteri, grup/panel ahli (*expert groups*), entitas sub-summit yang serupa. Hal tersebut menandai evolusi bertahap dari sistem G20 yang lebih luas.<sup>5</sup>

**Tabel 1. Kategori negara anggota G20**

<i>Advanced surplus countries:</i>	Jerman, Jepang, Korea Selatan
<i>Advanced deficit countries:</i>	Australia, Kanada, Prancis, Italia, Inggris, AS, plus negara area Euro (kecuali Jerman)
<i>Emerging surplus countries:</i>	Argentina, Tiongkok, Indonesia
<i>Emerging deficit countries:</i>	Brasil, India, Meksico, Afrika Selatan, Turki, dan negara UE non-Euro
<i>Major oil exporters:</i>	Rusia, Arab Saudi

<sup>3</sup> Sebelumnya, pada bulan April 2020, IMF-World Economic Outlook memproyeksikan pertumbuhan global sebesar -3%.

<sup>4</sup> IMF. 2020a. World Economic Outlook Update, June 2020. Washington, D.C.: IMF.

<sup>5</sup> Peter I Hajnal. 2014. The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation. Surrey/Burlington: Ashgate Publishing, Ltd.

Sumber: Hajnal, Peter I . 2014. *The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation*. Surrey/Burlington: Ashgate Publishing, Ltd.

Kelompok Riset G20, University of Toronto menyebutkan bahwa sejak KTT G20 pertama diadakan hingga saat ini, terdapat 23 isu yang telah dibahas, 194 komitmen yang nyata dan terukur, dan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 71%.<sup>6</sup> Sehingga, KTT G20 merupakan forum yang mampu meningkatkan taraf kehidupan jutaan orang atas kemampuannya menghasilkan kebijakan, hukum, dan peraturan internasional. Pada masa pasca krisis ekonomi tahun 2008, Inggris mengadakan KTT Khusus G20 pada tahun 2009, yang menghasilkan kesepakatan suntikan bantuan keuangan senilai \$ 1,1 triliun ke dalam ekonomi global. Sejauh ini, G20 telah membuat kemajuan penting dalam membentuk kembali tata kelola keuangan global yaitu dengan menerapkan kebijakan makroprudensial, pengaturan yang lebih ketat, meningkatkan kapasitas pinjaman IMF, dan giat mengumpulkan informasi tentang sistem *shadow banking*.<sup>7</sup> Seiring dengan keberhasilan yang telah dicapai G20, KTT G20 telah menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan empati dalam hubungan internasional. Selain itu, berbagai *engagement group* yang menjadi satu kesatuan dalam sistem tata kelola G20, seperti *business groups (B20)*, *civil society groups (C20)*, *labour unions (L20)*, *scientists (S20)*, *think tanks (T20)*, *cities (U20)*, *women's groups (W20)*, dan *youth groups (Y20)* yang memberikan saran atas keahlian masing-masing yang

berpengaruh terhadap hasil KTT. Sehingga, kerja sama G20 dalam mempercepat pemulihan ekonomi global dari COVID-19 menjadi penting untuk diteliti secara mendalam.

Bagaimanapun, G20 merupakan forum kerja sama internasional yang bersifat informal, tidak terinstitusionalisasi dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas. Analisis ketidakefektifan kerja sama G20 sering muncul seiring dengan konsistensi penyelenggaraan KTT dan kokohnya pondasi keanggotaan dalam G20. Jadi, tulisan ini akan menganalisis bagaimana G20 berperan dalam tata kelola global, khususnya menghadapi pandemi COVID-19, melalui kerja sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Guebert menyebutkan bahwa keberadaan G20 senantiasa didukung oleh organisasi multilateral yang ada dalam sistem internasional.<sup>8</sup> Setelah tiga kali KTT, G20 langsung mendeklarasikan dirinya sebagai forum utama bagi kerja sama ekonomi dan pertemuan para pemimpin dunia. Pernyataan tersebut diterima dengan baik (tanpa protes/penolakan) oleh PBB, Bank Dunia, WTO, IMF, FSB, OECD, dan ILO yang turut hadir dalam KTT tersebut. Lebih jauh, terbukti pasca krisis ekonomi 2008, Schirm menyebutkan bahwa G20 secara efisien telah menciptakan pemahaman bersama bahwa semua negara perlu meredam krisis melalui program stimulus nasional untuk meningkatkan permintaan pasar agar resesi dapat ditangkal.<sup>9</sup> Pemahaman tersebut kemudian menggiring negara untuk mau terlibat dalam berbagai program stimulus, sehingga kebijakan seperti proteksionis dan *beggar-thy-neighbor* muncul dalam skala yang lebih

<sup>6</sup> David A. Welch. 2019. Are G20 Summits Worth It? July 3. <http://www.g7g20.utoronto.ca/comment/190703-welch.html>.

<sup>7</sup> Dipanjan Roy Chaudhury. 2016. G20's achievements for global economy since the 2008 crisis. September 9. <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/g20s-achievements-for-global-economy-since-the-2008-crisis/articleshow/54251577.cms?from=mdr>.

<sup>8</sup> Jenilee Guebert. 2010. "The G8, G20 and Multilateral Organizations: Cooperating and Collaborating." *Studia Diplomatica* (Egmont Institute) 63 No. 2: 53-69.

<sup>9</sup> Stefan A. Schirm. 2011. *The G20, Emerging Powers, and Transatlantic Relations*. Washington, D.C.: German Marshall Fund of the United States, 3-5.

kecil dari perkiraan. Secara keseluruhan, hal tersebut adalah pencapaian besar dibandingkan dengan koordinasi kebijakan sebelum adanya KTT G20, karena tidak hanya berkaitan dengan ruang lingkup tematik, namun juga atas partisipasi negara-negara berkembang maupun negara industri yang berdampak signifikan.

Terkait COVID-19, *Council on Foreign Relations* meluncurkan laporan yang berjudul *Challenges of Global Governance Amid the COVID-19 Pandemic* yang memaparkan dampak pandemi terhadap kerja sama internasional. Laporan tersebut berisikan kritik dan saran atas perlunya reformasi untuk meningkatkan kapasitas sistem multilateral dan pemerintah nasional untuk mengantisipasi dan menanggapi pandemi di masa mendatang. Dalam laporan tersebut, Bernes menyebutkan bahwa G20 lumpuh dalam merespon pandemi ini. Amerika Serikat mendefinisikan masalah ini sebagai permasalahan Amerika Serikat melawan Tiongkok dan juga WHO.<sup>10</sup> Sementara Arab Saudi, yang merupakan pemimpin G20 tahun ini, tidak memiliki kapasitas kepemimpinan untuk mengatasi masalah sebesar ini.

Meskipun demikian, dalam laporan yang sama, Hatuel-Radoshitzky & Heistein menyatakan bagaimanapun kerja sama internasional masih tetap diperlukan. Tantangan global saat ini dan juga di masa depan menuntut kerja sama internasional dan tindakan yang jauh lebih baik untuk menghindari skenario terburuk. Meskipun persaingan antara kekuatan besar cenderung tetap menjadi fitur dinamika global untuk masa mendatang, minimal dapat mengurangi risiko disfungsi, yang diwujudkan dan diperkuat melalui performa kerja sama internasional saat ini terhadap COVID-19.

<sup>10</sup>Tom Bernes, dkk. 2020. *Challenges of Global Governance Amid the COVID-19 Pandemic*. New York: Council on Foreign Relations.

## Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, yang didefinisikan sebagai alat penelitian, teknik, dan strategi yang membantu penulis untuk mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data literal. Lamont & Boduszynski menyebutkan metode kualitatif dilakukan menggunakan alur pemikiran induktif, dikarenakan peneliti kualitatif cenderung menghasilkan proposisi teoritis dari pengamatan empiris.<sup>11</sup> Kemudian, penelitian kualitatif dapat menghasilkan deskripsi yang mendalam (*thick-description*).

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berbasis *internet-based research*. Data yang dikumpulkan berupa laporan resmi dan *press release* lembaga/instansi yang dikategorikan sebagai data primer. Lalu data dari berita di media massa, artikel dan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai data sekunder. Sehingga, penulis berharap dapat memberikan analisis yang mendalam dalam tulisan ini.

Tulisan ini secara spesifik akan menggunakan model dari John J. Kirton. Disebutkan dalam bukunya yang berjudul *G20 Governance for a Globalized World*, bahwa tata kelola G20 telah dianalisis menggunakan setidaknya empat mazhab. Secara komprehensif, Kirton menjelaskan setidaknya terdapat empat pemikiran ilmiah dalam memandang G20, yaitu *redundant*, *rejection*, *reinforcement*, *replacement*.<sup>12</sup> Pertama, yaitu *redundant*, berpandangan bahwa G20 bersifat mubazir atas periode pelaksanaannya yang panjang. Dengan asumsi *zero-sum*, G20 dianggap sebagai rival yang melekat pada G7/G8 agar cepat beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, sehingga dapat mengambil langkah

<sup>11</sup> Christopher Lamont and Mieczyslaw P. Boduszynski. 2020. *Research Methods in Politics and International Relations*. London: SAGE Publications Ltd.

<sup>12</sup> John J. Kirton. 2016. *G20 Governance for a Globalized World*. New York: Routledge.

jitu dan preventif perihal krisis ekonomi. Pasalnya, G20 terbukti gagal dalam memprediksi atau mencegah krisis finansial AS (2007-09), maupun krisis Uni Eropa terkait utang Yunani.

Pandangan kedua adalah *rejection*, yaitu menolak keunggulan/eksklusivitas G20, namun mengakui keberlanjutan dan kontribusi G20. Dengan asumsi *positive-sum*, meski pun G20 akan mampu menanggungnya, forum ini telah gagal menjadi pusat utama dari tata kelola ekonomi global. Klaim atas kelemahan G20 didukung kalangan pendekatan legalisasi *hard law*<sup>13</sup>. Mereka memprediksi G20 pada akhirnya akan gagal disebabkan oleh *superior power* atau penyelenggaraan *hard law (reformed* ataupun *existing*) dari lembaga multilateral. Kerja sama keuangan internasional menemui masalah *free-rider*, yaitu tidak semua negara anggota mampu berkontribusi dalam pembuatan regulasi finansial. Sehingga, keterlibatan mereka hanya menimbulkan biaya kerja sama, dan menekan kemungkinan terjadinya reformasi yang signifikan.

Pandangan ketiga, *reinforcement*, berpendapat bahwa tata kelola G20 merupakan variabel pendukung atas upaya yang G7/G8 dan badan serupa lainnya dalam menata kerja sama ekonomi internasional. Pandangan ini menyatakan bahwa G20 memiliki keistimewaan tersendiri sebagai pusat utama dalam kerja sama ekonomi internasional di antara para negara anggota secara permanen. Dijelaskan bahwa G20 memiliki misi utama terkhusus dalam penetapan

kestabilan keuangan, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan globalisasi. Diterangkan bahwa KTT G20 merupakan suatu jaringan inovatif, fleksibel, dan sangat diperlukan sebagai manajer risiko sistemik, dan sebagai benteng melawan bentuk-bentuk restriktif unilateralisme, tetapi memerlukan peningkatan legitimasi dan efisiensi agar dapat bekerja dengan baik.

Terakhir, yaitu *replacement*, yaitu G20 akan menjadi substitusi terhadap G7/G8. Dengan asumsi *zero-sum*, peran G7/G8 dalam tata kelola global perlahan akan memudar bahkan menghilang. Adapun pemikiran ini juga dijelaskan oleh sejumlah sub-pemikiran, di antaranya bahwa kegagalan G7/G8 adalah penyebab utama G20 akan menjadi pemain pengganti. Secara operasional maupun operasional, performa G20 dalam tata kelola global dianggap cukup kuat, baik di level KTM ataupun KTT. Disampaikan bahwa perubahan keseimbangan kekuatan global akan meninggikan rekognisi global terhadap G20. Argumen "*institutionalized informality*" disebutkan menjadi kunci kepatuhan (*compliance*) terhadap para pimpinan negara. Ketika kepentingan dan ekspektasi bersama telah didiskusikan *face-to-face*, maka momentum positif dan saling mendukung akan memproses kebijakan yang lebih baik.

Namun, dari keempat pemikiran di atas, Kirton mengkritisi bahwa belum ada yang mampu menjelaskan bagaimana G20 mampu beroperasi secara sistemik, baik secara keseluruhan, maupun terkait struktur isu atau lingkaran kekuasaan. Sehingga, Kirton memperkenalkan suatu model yang dinamai *systemic hub model* untuk menjelaskan tata kelola G20. Dalam model tersebut, terdapat enam dimensi untuk menganalisis kinerja institusional G20, antara lain:

- 1) *Domestic political management*, yaitu keuntungan ekonomi yang muncul akibat prestise dan peningkatan citra negara -ketika

<sup>13</sup> Istilah *hard law* dan *soft law* berasal dari pandangan pakar hukum yang digunakan untuk membedakan hukum yang mengikat dan tidak mengikat. Dalam perkembangannya, terdapat kecenderungan pembentukan hukum internasional dilakukan dalam bentuk hukum lunak, khususnya apabila menyangkut isu yang sensitif dan kompleks. Mardianis. 2013. "'Hard Law" dan "Soft Law" dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia." Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan (LAPAN) 1-19.

- menjadi anggota G20, menjadi ketua atau tuan rumah KTT-mengimbangi biaya keuangan, fisik maupun politik;
- 2) *Deliberation*, yaitu kesempatan internal dan privat untuk mengadakan diskusi bilateral pada saat KTT/KTM berlangsung, yang berimbas kepada pertemuan lanjutan dan peningkatan kerjasama bilateral;
  - 3) *Direction setting*, yaitu kemampuan G20 dalam mengarahkan sistem adaptif yang kompleks;
  - 4) *Decision making*, yaitu G20 yang mengaplikasikan *soft law* mampu menentukan komitmen bersama yang kredibel dan berfungsi sebagai rujukan, sumber moral baik bagi anggota G20 maupun pihak eksternal;
  - 5) *Delivery*, yaitu mulai dari penyampaian komitmen hingga pengimplementasian yang efektif oleh anggota G20 dalam menyelesaikan permasalahan;
  - 6) *Development of global governance*, secara internal yaitu pembentukan, kontinuitas, dan evolusi G20 sebagai institusi internasional. Lalu, secara eksternal, yaitu kemampuan G20 untuk mempertahankan identitasnya dan beroperasi sebagai suatu kelompok yang lebih besar di dalam jaringan global (*global network hub*).

Berdasarkan enam dimensi di atas, tulisan ini akan mengobservasi kerja sama G20 dalam menangani pandemi COVID-19. Bagaimanapun, tata kelola global oleh G20 merupakan hasil dari proses koalisi diplomasi yang terus mengalir, dengan karakteristik sebagai berikut: 1) setiap anggota akan memimpin; 2) setiap anggota bisa mendukung atau pun menolak; 3) berbagai koalisi, yang melintasi kriteria konvensional atau blok yang sudah ada,

akan terbentuk dengan fleksibel tergantung isu yang berkembang; 4) bahkan negara yang paling kuat pun pada akhirnya akan menyesuaikan dan mematuhi hasil/keputusan kolektif.<sup>14</sup> Sehingga, dengan memposisikan G20 sebagai penentu arah tata kelola global, maka dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi global yang tengah dilakukan, tulisan ini akan memuat analisis mendalam atas performa G20.

### Hasil dan Diskusi Pertemuan G20 Merespon Pandemi COVID-19

Pada tahun 2020, rangkaian pertemuan G20 diawali pada bulan Februari yaitu KTM Menteri Keuangan dan Bank Sentral yang menghasilkan komunikasi berjudul *Realizing Opportunities of the 21st Century for All*. Pertumbuhan perekonomian dunia disadari berjalan lambat bahkan cenderung menurun, dikarenakan ketegangan perdagangan dan geopolitik, dan ketidakpastian kebijakan. Pada saat itu, COVID-19 belum diumumkan sebagai pandemi, tetapi masih dilihat sebagai wabah, sehingga pertemuan tersebut berfokus kepada penegasan kembali upaya percepatan untuk mengembangkan pasar modal domestik untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan dan inklusi keuangan. Disebutkan bahwa G20 mendukung *joint note* dari IMF dan Bank Dunia mengenai pembangunan pasar obligasi mata uang lokal di negara berkembang dan menyambut baik peningkatan upaya berkelanjutan dalam mengembangkan pasar modal domestik, terutama di negara berkembang, dengan mempertimbangkan keadaan spesifik negara.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Kirton, G20 Governance for a Globalized World.

<sup>15</sup> G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020a. Communiqué: Realizing Opportunities of the 21st Century for All. Riyadh: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

Pada awal Maret 2020, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengeluarkan pernyataan resmi terkait COVID-19 untuk mendukung langkah-langkah berkelanjutan negara dalam menanggulangi wabah, mencegah meluasnya penularan, dan mengobati mereka yang terkena dampak. Dinyatakan bahwa G20 siap untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan moneter yang bertujuan untuk mendukung perekonomian dan ketahanan sistem keuangan. Digarisbawahi perlunya kerja sama untuk memitigasi risiko terhadap ekonomi global, sehingga kekompakan dari organisasi multilateral lainnya sangat diperlukan, tepatnya dengan IMF, Bank Dunia, OECD, FSB, dan WHO.<sup>16</sup>

COVID-19 secara resmi diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Pengumuman tersebut mengakibatkan respon esktrm dari hampir semua negara di dunia. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, menyatakan bahwa COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, melainkan krisis yang akan menyentuh setiap sektor dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan penyebaran dan penularan COVID-19 adalah sumber dari keparahan yang dialami dunia saat ini.

Dalam menanggapi pengumuman WHO di atas, Sherpa G20<sup>17</sup> dan Arab Saudi, sebagai pemimpin G20 2020, langsung memberi respon. Pada tanggal 12 Maret 2020, Sherpa G20 mengumumkan bahwa G20 akan bekerja sama dengan WHO untuk memantau dan berbagi

informasi yang relevan untuk menanggulangi pandemi ini. Disampaikan bahwa pengembangan sistem peringatan dini, pemberian perawatan yang sesuai dan pengembangan vaksin akan didukung penuh oleh G20. Perihal ekonomi global, G20 menegaskan kembali bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah sepakat untuk menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia, termasuk langkah-langkah fiskal dan moneter yang sesuai. Selang sehari, presidensi Arab Saudi memastikan bahwa forum dan diskusi penting G20 akan tetap berlangsung, dan akan fokus mengoordinasikan upaya melawan dampak pandemi COVID-19.

Pada tanggal 17 Maret 2020, diumumkan bahwa KTT G20 akan diselenggarakan secara konferensi virtual, yang disebut sebagai *G20 Extraordinary Leaders' Summit*. Lalu, KTT Luar Biasa tersebut diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2020, yang dihadiri oleh semua kepala negara G20, negara-negara undangan, dan organisasi regional dan multilateral. Organisasi multilateral yang berpartisipasi antara lain WHO, PBB, IMF, Bank Dunia, WTO, FSB, ILO, FAO, dan OECD. Sementara organisasi regional yang hadir adalah *Arab Monetary Fund (AMF)*, *Islamic Development Bank (IsDB)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *African Union (AU)*, *Gulf Cooperation Council (GCC)*, dan *New Partnership for Africa's Development (NEPAD)*.

KTT Luar Biasa G20 menyatakan bahwa negara anggota G20 tengah melakukan tindakan nyata dan segera untuk mendukung ekonomi mereka, termasuk melindungi pekerja, bisnis — terutama usaha mikro, kecil dan menengah — dan sektor-sektor yang paling terpengaruh, serta melindungi yang rentan melalui perlindungan sosial yang memadai. Negara anggota G20 telah menyuntikkan dana sebesar lebih dari 5 triliun USD ke dalam

<sup>16</sup> G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020b. Statement on COVID-19. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.

<sup>17</sup> Negara G20 memiliki perwakilan pribadi yang akan dikenal sebagai sherpa. Sherpa bertanggung jawab untuk mempersiapkan -dengan berkonsultasi dengan rekan-rekan G20- KTT yang akan datang dan mengadakan penutupan pasca-KTT. Proses persiapan juga termasuk konsultasi antara sherpa dengan stakeholder non-pemerintah seperti sektor bisnis, think-tank dan kelompok masyarakat sipil.

ekonomi global, sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ditargetkan, langkah-langkah ekonomi, dan skema jaminan untuk menangkal dampak sosial, ekonomi dan keuangan dari pandemi.<sup>18</sup> G20 berkomitmen untuk memberikan dukungan fiskal demi pemulihan ekonomi global. Perihal perdagangan, G20 fokus terhadap aliran pasokan medis yang vital, produk pertanian untuk pemenuhan kebutuhan primer, dan penyelesaian gangguan pada rantai pasokan global. Disampaikan bahwa meskipun dalam keadaan krisis, G20 menegaskan pentingnya menjaga iklim perdagangan dan investasi yang terbuka, bebas, adil, tidak diskriminatif, transparan, dapat diprediksi, dan stabil.

IMF yang turut hadir dalam KTT LB juga menyampaikan pentingnya pemberian dukungan fiskal, khususnya atas beban utang yang tinggi (akibat macet). Kristalina Georgieva, *IMF Managing Director*, menyebutkan bahwa pukulan krisis berupa kombinasi krisis kesehatan, pelarian modal ke tempat aman, terhentinya aktivitas perekonomian global terhadap negara berkembang merupakan prioritas IMF. Dana sebesar 1 triliun USD akan diprioritaskan untuk negara berkembang, dengan bekerja sama dengan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya. Langkah-langkah yang disarankan oleh IMF adalah: 1) Gandakan kapasitas pembiayaan darurat IMF; 2) tingkatkan likuiditas global melalui alokasi *Special Drawing Right* (SDR) yang cukup besar; 3) memperluas penggunaan fasilitas *swap* dalam aksi Fund Support dari kreditor bilateral resmi, untuk meringankan beban utang negara-negara miskin.<sup>19</sup> Khusus mengenai alokasi SDR, IMF menyebutkan

bahwa langkah tersebut terbukti berhasil dalam membangkitkan perekonomian negara pasca krisis ekonomi tahun 2008-9.<sup>20</sup> Pada tahun 2009, anggota IMF setuju untuk membuat alokasi umum SDR yang setara pada saat itu menjadi 250 miliar USD, menghasilkan peningkatan SDR yang hampir sepuluh kali lipat. Angka tersebut mewakili peningkatan cadangan yang signifikan bagi banyak negara, khususnya negara-negara berpenghasilan rendah. Lalu pada Desember 2010, IMF menggandakan sumber daya permanen IMF menjadi SDR 477 miliar (sekitar 663 miliar USD) untuk meningkatkan kapasitas pinjaman IMF.

Pernyataan senada dari Bank Dunia, menginformasikan bahwa organisasi yang dibawahi oleh Bank Dunia telah mencanangkan berbagai program tanggap darurat COVID-19. David Malpass, Presiden World Bank Group, menyebutkan *International Finance Corporation* (IFC) sudah mengerjakan investasi baru di 300 perusahaan dan memperluas jalur pembiayaan perdagangan dan modal kerja ke klien; *International Development Association* (IDA) fokus pada proses bantuan utang (*debt relief*) secara luas dan merata untuk negara berkembang.<sup>21</sup> Selain itu, Bank Dunia juga mendukung pemberian lebih banyak dana untuk *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) demi penemuan vaksin COVID-19.

Dalam KTT LB G20, para pemimpin negara G20 mengingatkan bahwa pandemi ini mengingatkan dunia mengenai kerentanan dan keterkaitan. Kerja sama internasional harus difungsikan untuk menguatkan baik negara maju maupun negara berkembang dalam kancah

<sup>18</sup> G20. 2020a. Extraordinary G20 Leaders' Summit: Statement on COVID-19. Riyadh: G20.

<sup>19</sup> IMF. 2020b. Remarks by IMF Managing Director Kristalina Georgieva During an Extraordinary G20 Leaders' Summit [Press Release]. March 26. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-georgieva-0326.html>.

<sup>20</sup> IMF. 2016. Factsheet: IMF's Response to the Global Economic Crisis. March 22. <https://www.imf.org/external/np/exr/facts/changing.htm?links=false>.

<sup>21</sup> World Bank. 2020b. Remarks to G20 Leaders' Virtual Summit [Press Release]. March 26. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-malpass-0326.html>.

perekonomian global. Tanpa melanggar kewenangan domestik negara, ditekankan pentingnya koordinasi internasional yang lebih besar atas kebijakan ekonomi makro untuk mengembalikan kepercayaan pada pertumbuhan global dalam menghadapi dampak pandemi ini.

### **Kinerja Institusional G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19**

Studi Hubungan Internasional berusaha memahami bagaimana hubungan internasional berfungsi dan membangun fondasi kerja sama dan integrasi. Untuk memahami kinerja institusional G20 yang mengupayakan pemulihan ekonomi global, tulisan ini menggunakan enam dimensi milik Kirton sebagai indikator kinerja sistemik G20. Keenam dimensi tersebut adalah *domestic political management; deliberation; direction setting; decision making; development of global governance*.

Pertama, *domestic political management*, yaitu keuntungan atas peningkatan citra positif negara. Prestise dengan menjadi anggota G20, menjadi ketua atau tuan rumah KTT dianggap dapat mengimbangi konsekuensi pengeluaran keuangan negara. Disebabkan oleh G20 tidak memiliki sekretariat permanen, maka dukungan kesekretariatan disediakan oleh negara yang menjadi ketua G20 pada tahun berjalan, yang dengan kapasitas tersebut, bertanggung jawab dalam mengorganisir KTT tahunan.<sup>22</sup>

Pada tanggal 1 Desember 2019, Arab Saudi mengambil alih presidensi G20 dari Jepang, dengan masa jabatan selama 1 tahun. Presidensi Arab Saudi otomatis menjadikannya sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 tahun 2020. Diberitakan bahwa Direktur Amnesty

<sup>22</sup> Jan Rood. 2014. *Transnational Governance and Democratic Legitimacy: The Case of the G20 and Financial-Economic Cooperation*. The Hague: The Hague Institute for Global Justice/ Netherlands Institute of International Relations Clingendael.

International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara menyebutkan bahwa Arab Saudi naik ke kursi kepresidenan G20 saat kondisi domestiknya tengah berlangsung gelombang penangkapan para kritikus – akademisi, penulis, aktivis– secara sewenang-wenang, sehingga banyak pembela hak asasi manusia mendekam di balik jeruji besi, dan setahun lebih sejak kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.<sup>23</sup> Sehingga, status baru yang diemban oleh Arab Saudi dilihat sebagai upaya untuk bangkit kembali ke panggung dunia dan mempromosikan upaya liberalisasi di negaranya. Meskipun demikian, Arab Saudi meyakini bahwa presidensinya di G20 merupakan kesempatan unik untuk membangun rezim multilateral.

Presidensi Arab Saudi diuji ketika COVID-19 diumumkan sebagai pandemi. Dengan agenda sekitar 100 acara dan konferensi menjelang KTT, termasuk KTM, Arab Saudi terpaksa melakukan banyak penyesuaian seperti penundaan atau pembatalan acara. Meskipun demikian, Arab Saudi telah menunjukkan respon secara sigap dengan menyegerakan KTT LB G20 untuk mendiskusikan penyelesaian pandemi global ini. Lebih jauh, pada 16 April 2020, Presidensi Arab Saudi mengumumkan bahwa negaranya siap untuk mendukung upaya global dalam memerangi COVID-19, dengan menjanjikan dana bantuan sebesar 500 juta USD kepada organisasi terkait.<sup>24</sup> Arab Saudi akan mengalokasikan 150 juta USD untuk CEPI, 150 juta USD untuk Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), dan 200 juta USD untuk organisasi dan program kesehatan internasional dan regional lainnya.

<sup>23</sup> AGENCY, AFP NEWS. 2019. Saudi Arabia takes over G20 presidency from Japan. December 1. <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/saudi-arabia-takes-g20-presidency-japan-191201111457831.html>.

<sup>24</sup> G20. 2020b. G20 Information Centre. April 16. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-covid-funding-0416.html>.

Langkah tersebut diambil untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh *Global Preparedness Monitoring Board* (GPMB) bahwa dunia membutuhkan sekitar 8 miliar USD untuk biaya tanggap darurat, diagnostik, perawatan, dan pengembangan, pembuatan, dan penyebaran vaksin yang diperlukan untuk COVID-19. Sherpa G20 dari Arab Saudi mengatakan pentingnya fokus terhadap pencarian solusi, untuk mendapatkan vaksin dan tindakan terapeutik lainnya, serta menggarisbawahi urgensi untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan global.<sup>25</sup>

Selain itu, di penghujung April 2020, WHO meluncurkan kolaborasi global untuk percepatan pengembangan, produksi, dan akses terhadap vaksin COVID-19 yang disebut *Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator*. Seketika Presidensi Arab Saudi merespon peluncuran tersebut melalui siaran pers pada tanggal 26 April 2020. Disampaikan bahwa Menteri Keuangan Arab Saudi turut berpartisipasi dalam acara peluncuran inisiatif Akselerator ACT tersebut, dan menyoroti bahwa masyarakat internasional masih menghadapi ketidakpastian akhir dari krisis kesehatan ini. Disebutkan juga bahwa sebagai Ketua G20 tahun 2020, Arab Saudi berkomitmen untuk memimpin dan bekerja dengan mitra dan organisasi terkait dalam menanggapi pandemi COVID-19, serta memprioritaskan untuk mengisi kesenjangan pembiayaan kesehatan negara.<sup>26</sup>

Langkah-langkah yang diambil Arab Saudi menunjukkan manajemen politik domestik dengan menjadikan kesepakatan G20 sebagai landasan pengambilan

kebijakan nasional. Arab Saudi menciptakan citra negara dengan perekonomian yang mapan; pemimpin yang cepat tanggap; dan negara yang toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kirton menyebutkan bahwa hal tersebut juga akan berimbas kepada munculnya dukungan opini publik domestik bagi presidensi G20.

Dimensi kedua adalah *deliberation*, yaitu kesempatan yang diperoleh baik oleh pimpinan negara maupun staff untuk mengadakan diskusi privat secara bilateral pada saat KTT/KTM berlangsung. Penjelasan untuk dimensi ini biasanya terlihat jelas dari KTT G20 yang terdahulu. Contohnya, pada KTT 2019 di Osaka, Jepang, Indonesia menghadiri 6 pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20, yaitu dengan Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi, India, Turki, Australia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan bahwa sebetulnya terdapat 16 permintaan bilateral kepada Indonesia, namun sulit direalisasikan karena keterbatasan waktu.<sup>27</sup>

Kirton menyebutkan pertemuan bilateral yang dilakukan oleh kepala negara anggota G20 akan berimbas kepada pertemuan lanjutan dan peningkatan kerjasama bilateral. Pada tahun 2020, dimensi ini tidak terlalu menonjol karena KTT G20 dilakukan secara virtual. Meskipun demikian, kemitraan dalam konteks bilateral terus berjalan intensif di antara negara anggota G20. Misalnya, Indonesia telah menyepakati kolaborasi penanganan COVID-19 dengan Amerika Serikat, yang diresmikan melalui penyerahan simbolis bantuan 100 unit ventilator dari Amerika Serikat kepada Indonesia. Disampaikan bahwa ini terjadi berkat pembicaraan antara kedua kepala negara via telepon, sehingga menunjukkan

<sup>25</sup> G20. 2020c. G20 Information Centre. April 24. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-covid-0424.html>.

<sup>26</sup> G20. 2020d. Saudi G20 Presidency Welcomes the Launch of "Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator" Initiative. April 26. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-act-0426.html>.

<sup>27</sup> Detiknews. 2019. Indonesia Terima 16 Permintaan Pertemuan Bilateral di Sela KTT G20. Juni 26. <https://news.detik.com/berita/d-4601315/indonesia-terima-16-permintaan-pertemuan-bilateral-di-sela-ktt-g20>.

adanya hubungan personal dan saling perhatian yang terbangun. Lalu, Indonesia dan Tiongkok juga telah menyepakati upaya bersama percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, diantaranya pemulihan arus ekspor impor, kelanjutan proyek strategis nasional, dan proyek investasi yang melibatkan Tiongkok di Indonesia. Ini menjadi dimensi yang sifatnya saling menguntungkan dan saling mencerahkan bagi kedua negara.

Dimensi yang ketiga, *direction setting*, yaitu bagaimana G20 mampu mengarahkan perilaku adaptif atas sistem yang kompleks. Sebagai forum diskusi yang memperdebatkan dan menginisiasi kebijakan dan keputusan politik, G20 melakukan legitimasi isu COVID-19 sebagai prioritas global. G20 telah memimpin respons global dan berkomitmen untuk melakukan ‘semuanya’ dalam memerangi pandemi ini. Anggota G20 telah mengambil tindakan yang belum pernah diambil sebelumnya, dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk mengatasi pandemi dan ancaman krisis ekonomi global.

Sherpa G20 secara intensif mengupayakan berbagai pertemuan meskipun dalam kondisi pandemi. Setelah KTT LB G20 dilaksanakan, menyusul KTM G20 yang juga dilaksanakan secara virtual, dan juga pertemuan antara *engagement group* G20. Adapun KTM yang telah dilaksanakan antara menteri perdagangan dan investasi; menteri keuangan dan gubernur bank sentral; menteri ekonomi digital; menteri energi; menteri kesehatan; menteri pertanian; menteri ketenagakerjaan; menteri pariwisata; menteri pendidikan.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi global yang disebabkan oleh COVID-19, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengumumkan komunike yang berisikan 33 komitmen yang wajib secara politik dipenuhi oleh negara G20 (Tabel 2). Untuk memastikan tidak

terjadinya kerusakan jangka panjang terhadap perekonomian global, G20 berkomitmen untuk memberikan dukungan substansial kepada bisnis, seperti alokasi likuiditas dan dukungan pendanaan. Diketahui bahwa di negara-negara maju G20, dukungan keuangan untuk bisnis merupakan bagian terbesar dari porsi fiskal, yaitu sekitar 15% dari PDB, dibanding 7,5% dari PDB untuk dukungan non-bisnis. Di antara negara-negara pasar berkembang G20, intervensi fiskal juga terkonsentrasi di sektor bisnis, sekitar 4 persen% dari PDB, dibanding hampir 2,5% dari PDB untuk dukungan non-bisnis.<sup>28</sup>

**Tabel 2. Komitmen Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, 18 Juli 2020**

No	Isu/Permasalahan	Jumlah komitmen
1.	Regulasi Keuangan	7
2.	Kesehatan	6
3.	Terorisme	6
4.	Pembangunan	4
5.	Perpajakan	2
6.	Reformasi Lembaga Keuangan Internasional	2
7.	Infrastruktur	2
8.	Kebijakan Makroekonomi	1
9.	Perdagangan Internasional	1
10.	Kebijakan Sosial	1
11.	Kerja Sama Internasional	1

Sumber: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. Communiqué [18 July 2020]. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

Tabel 2. menunjukkan bahwa prioritas komitmen G20 didominasi mengenai regulasi keuangan, lalu diikuti dengan isu kesehatan dan terorisme. Porsi tersebut dapat dilihat sebagai prioritas yang diidentifikasi oleh G20, khususnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi global. Kesalingterhubungan dan

<sup>28</sup> G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. Communiqué [18 July 2020]. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

spesifikasi komitmen terkait pandemi memberikan gambaran bagaimana G20 melakukan *direction setting*.

Dimensi keempat, *decision making*, yaitu *soft law* berupa komunique G20 mampu menciptakan komitmen bersama yang kredibel dan berfungsi sebagai rujukan, sumber moral baik bagi anggota G20 maupun pihak eksternal. Hingga Agustus 2020, terdapat tiga komunique yang telah dihasilkan G20, yang semuanya berasal dari KTM Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 2, G20 telah menyepakati Rencana Aksi G20 yang menetapkan prinsip-prinsip utama yang memandu tanggapan dan komitmen G20 terhadap tindakan spesifik untuk mendorong kerja sama ekonomi internasional saat G20 menavigasi krisis kesehatan yang terjadi, dan melihat ke depan menuju ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan pemulihan secara inklusif. Pada komunique tanggal 18 Juli 2020 tersebut, dilampirkan annex laporan kemajuan Rencana Aksi G20. Disebutkan bahwa selain memberikan alokasi likuiditas dan dukungan pendanaan bagi sektor bisnis, G20 juga mendukung individu dan rumah tangga untuk mempertahankan keterikatan mereka pada pasar tenaga kerja, termasuk melalui bentuk kerja yang fleksibel. Dilaporkan bahwa pemerintah negara anggota G20 telah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk mempertahankan karyawan dalam daftar gaji dan/atau pengembalian premi asuransi jika perusahaan meminimalkan PHK. IMF mencatat bahwa di seluruh negara maju G20, langkah-langkah ini berjumlah 1,1 triliun USD atau rata-rata 2,5 persen dari PDB, dan di negara-negara pasar berkembang G20 menjadi sekitar 22,5 miliar USD atau rata-rata 0,1 persen dari PDB.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. Communiqué [18 July 2020].

Selain itu, negara anggota G20 juga telah memperluas ketentuan untuk melindungi pekerja dan keluarga yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan wiraswasta, misalnya memperluas akses ke tunjangan pengangguran; memberikan akses yang lebih mudah ke negara-negara berpenghasilan rendah, memastikan akses makanan untuk populasi yang rentan misalnya program bantuan pangan dan menyediakan transfer tunai langsung. IMF mencatat bahwa di seluruh negara G20, dukungan untuk individu berjumlah sekitar 1 triliun USD, atau rata-rata 2,5 persen dari PDB di negara-negara maju, dan 128 miliar USD, atau rata-rata 0,6 persen dari PDB di negara-negara *emerging market*.<sup>30</sup>

Dalam dimensi ini, komitmen negara G20 dibutuhkan untuk mencegah kemunduran standar hidup masyarakat dan performa ekonomi global. Dalam merespon pandemi COVID-19, pengambilan kebijakan yang bersifat nasionalistik dan *inward-looking policy* dianggap wajar. Namun, melalui komunique ini, diharapkan negara tetap membuka diri dalam membangun relasi kerja sama di antara mereka. Melalui komunique, tergambar ambisi dan signifikansi komitmen negara anggota G20 menangani dampak krisis yang tidak proporsional, yaitu antara negara maju dan negara berkembang.

Dimensi kelima, *delivery*, yaitu penyampaian komitmen negara anggota G20, sampai implementasi secara efektif menyelesaikan masalah. Untuk menjaga keberlanjutan komitmen kerja sama G20, biasanya presidensi G20 akan memberikan mandat kepada presidensi G20 baru, sehingga pada pelaksanaan KTT selanjutnya, agendanya berlanjut. Mekanisme ini menjadi proses pendalaman dalam setiap kategori komitmen yang dibangun dan berkaitan erat untuk menjaga

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

<sup>30</sup> G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. Communiqué [18 July 2020].

kepatuhan anggota. Dalam melihat performa institusional G20, negara dilihat sebagai kesatuan aktor rasional, sehingga rezim yang dibangun diperuntukkan juga untuk masyarakat umum (negara non-anggota G20).

Pada dimensi ini, kepatuhan dari negara anggota menjadi salah satu unsur pendukungnya. Misalnya, berdasarkan komunikasi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengenai pemberian dukungan kepada sektor UMKM, Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 12 juta UMKM produktif berupa dana sebesar 2,4 juta rupiah untuk masing-masing. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kredit dan subsidi bunga bagi UMKM.<sup>31</sup> Program bantuan tersebut tentu melibatkan BUMN dan swasta, sehingga sesuai dengan pernyataan G20 agar negara dapat mendorong peningkatan saluran dan jaringan komunikasi untuk UMKM, termasuk melalui kolaborasi yang lebih mendalam dengan sektor swasta. Selain itu, Indonesia juga telah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin.

Sementara itu, pada tanggal 3 Mei 2020, Arab Saudi juga kembali membuktikan komitmennya melalui keikutsertaannya sebagai negara mitra dalam *Global Response Pledging* yang diinisiasi oleh Uni Eropa. Negara anggota G20 lain yang turut bergabung di antaranya adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, serta satu negara non-anggota G20, Norwegia. *Global Response Pledging* merupakan aksi cepat tanggap Komisi Eropa terhadap seruan aksi global yang diluncurkan oleh WHO melalui GPMB.<sup>32</sup> Aksi tersebut dapat dilihat

sebagai penyampaian komitmen oleh negara anggota G20 dan bentuk seruan kepada negara-negara dunia lainnya, khususnya negara maju, agar turut berkontribusi.

Pada dimensi ini, tiap-tiap negara anggota memiliki ekspektasi bahwa apabila negaranya patuh terhadap komitmen yang dibuat, maka negara anggota lainnya juga akan bersikap patuh. Maka, G20 menjadi arena dengan aturan bermain terkait hak dan kewajiban negara anggota. Kepatuhan terhadap komitmen yang dipertunjukkan, apabila menghasilkan capaian positif, maka biasanya akan berimbas juga kepada negara di luar arena. Sehingga, negara non-anggota G20 juga akan mengadopsi langkah dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh negara anggota G20.

Terakhir, dimensi keenam, *development of global governance*. Secara internal yaitu pembentukan, kontinuitas, dan evolusi G20 sebagai institusi internasional. Meskipun keanggotaan G20 sejak tahun 1999 level KTM hingga saat ini bersifat konstan, namun cakupan isu yang menjadi perhatian G20 berkembang seiring dengan dinamika perekonomian global. Berawal dari inisiasi di bidang ekonomi dan finansial, agenda KTT G20 telah berkembang secara kontinu dan inovatif dengan menyentuh isu pembangunan, keamanan pangan, perubahan iklim, dan lainnya. Jika kita melihat kembali Tabel 2, pada KTM Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral diprioritaskan juga perihal isu terorisme. Komitmen tersebut termasuk tentang anti pencucian uang, sering dikategorikan sebagai kejahatan dan korupsi), pembiayaan proliferasi dan kontraterorisme. Kirton menyebutkan perhatian terhadap terorisme ini menunjukkan bahwa pada level menteri ini,

<sup>31</sup> Kompas. 2020. Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan. Agustus 10. <https://money.kompas.com/read/2020/08/10/203000526/erick-thohir--bantuan-rp-2-4-juta-per-umkm-disalurkan-dalam-1-2-minggu-ke>.

<sup>32</sup> European Commission. 2020. Coronavirus Global Response Pledging Conference. May 4.

[https://ec.europa.eu/international-partnerships/events/coronavirus-global-reponse-pledging-conference\\_en](https://ec.europa.eu/international-partnerships/events/coronavirus-global-reponse-pledging-conference_en).

G20 telah menjadi pengelola keamanan global yang semakin kokoh.<sup>33</sup>

Lalu, secara eksternal, yaitu kemampuan G20 untuk mempertahankan identitasnya dan beroperasi sebagai suatu kelompok yang lebih besar di dalam jaringan global (*global network hub*). Berdasarkan komunikasi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dalam mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi global, G20 telah berkoordinasi dan menyamakan langkah dengan institusi-institusi internasional terkait, diantaranya adalah IMF, Bank Dunia, WTO, FSB, OECD, WHO. Pada dasarnya, hubungan antara G20 dengan organisasi multilateral lain telah terbangun sejak awal, khususnya institusi Bretton Woods yang terlibat sejak KTT Keuangan dan Bank Sentral G20 pertama, yaitu tahun 1999. Bahkan, Ketua IMF dan Presiden World Bank adalah undangan permanen dalam setiap KTT G20. Keterlibatan berkelanjutan tersebut juga menimbulkan ilustrasi bahwa meskipun G20 hanya berupa forum, sementara IMF adalah institusi, namun IMF akan senantiasa menyepakati hasil dialog G20.<sup>34</sup>

Selain itu, di dalam keanggotaan G20, terdapat juga kelompok negara-negara yang menggabungkan diri berdasarkan kesamaan, yaitu BRICS dan MIKTA. BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China dan South Africa yang mengasosiasikan diri sebagai *major emerging national economies*. Sementara MIKTA adalah akronim dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia dari kemitraan informal antara negara *middle power*. Kesepuluh negara yang terbagi menjadi dua kelompok tersebut adalah negara anggota G20.

<sup>33</sup> John Kirton. 2020. Steady As She Goes: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors in July 2020. July 18. <http://www.g20.utoronto.ca/analysis/200718-kirton-finance.html>.

<sup>34</sup> Hajnal. The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation.

Sehingga, sering kali agenda diskusi dari kedua kelompok tersebut berkesinambungan dengan komitmen G20. Terkait COVID-19, Pernyataan Bersama Menteri Luar Negeri MIKTA pada 9 April 2020 menyatakan bahwa MIKTA menyambut baik solidaritas kuat yang diungkapkan oleh G20 pada KTT LB, dan akan menggunakan semua perangkat kebijakan yang tersedia untuk meminimalkan kerusakan ekonomi dan sosial dari pandemi, memulihkan pertumbuhan global, menjaga stabilitas pasar, serta memberikan perhatian khusus pada sektor yang paling terkena dampak, termasuk mereka yang bekerja di ekonomi informal dan UMKM.<sup>35</sup> Misalnya bagi Indonesia, peran dan diplomasi Indonesia dalam MIKTA dan G20 ini tentu merupakan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, regional dan internasional sebagai bentuk kepentingan nasional dan kepentingan internasional.<sup>36</sup>

Konsistensi dan komitmen G20 menunjukkan keunggulan kepemimpinan G20 dalam menangani krisis dan permasalahan global, khususnya di bidang ekonomi. Jejaring yang mampu dihubungkan oleh G20 telah membentuk sistem penyelesaian berbasis forum yang mampu memberikan dampak signifikan bagi hubungan internasional. G20, bersama dengan G8, dilihat oleh institusi-institusi internasional memiliki kekuatan dan kegunaan dalam mempengaruhi bagaimana

<sup>35</sup> MIKTA. 2020. "MIKTA Foreign Ministers' Joint Statement on the COVID-19 Pandemic and Global Health." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. april 9. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1209/pidato/mikta-foreign-ministers-joint-statement-on-the-covid-19-pandemic-and-global-health>.

<sup>36</sup> Wiwiek R.D. Astuti, & Laode M. Fathun, L. 2020. Indonesian Economic Diplomacy in the G20 Economic Regime during the Administration of Joko Widodo. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 5(1), 47-68. doi:10.24198/intermestic.v5n1.4

negara di dunia merespon permasalahan global.<sup>37</sup>

### **Kesimpulan**

Pada dasarnya, negara anggota G20 menjadikan forum ini sebagai wadah untuk membangun rasa percaya antar masing-masing negara anggota. Pandemi COVID-19 direspon negara dengan menutup perbatasan, namun, faktor-faktor mendasar yang menyebabkan dunia saling terhubung akan tetap relevan. Sehingga, seiring dengan terjadinya pandemi, manfaat keterbukaan informasi dan kerja sama internasional akan terus berlanjut. G20 terus mengambil tindakan, di bawah Presidensi Arab Saudi, dan akan bertindak secara kolektif, segera dan dengan berani untuk memerangi efek global dari pandemi ini dan untuk menerapkan tindakan prioritas di semua aliran kerja G20.

Kerja sama G20 dalam pemulihan ekonomi global dari COVID-19 telah dipaparkan dalam kerangka model Kirton. Sejauh ini, prestasi dan konsensus secara profesional telah ditunjukkan oleh G20 dalam merespon penurunan performa ekonomi global akibat COVID-19. Pentingnya *international measure* dalam menghadapi krisisnya telah dipromosikan secara konsisten oleh G20. Koordinasi dan evaluasi terhadap perbedaan kapasitas setiap anggota telah dilaksanakan untuk mengukur ketepatan langkah negara anggota G20.

Keberhasilan G20 akan memiliki dampak signifikan bukan hanya pada perekonomian negara G20 namun juga bagi seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan keseimbangan ekonomi 20 negara anggota G20 akan dapat menjamin kestabilan ekonomi dunia, karena kerja sama yang dilakukan dioperasionalkan melalui jaringan global. Prestise yang didapatkan oleh

negara G20 juga diiringi dengan komitmen yang menunjukkan suatu proses tata kelola global, khususnya dalam mengatasi krisis kesehatan 2020 ini. Demikian juga dengan kepatuhan negara anggota G20 yang akan menarik langkah-langkah yang sama dari negara non-anggota G20.

---

<sup>37</sup> Guebert, Jenilee. 2010. "The G8, G20 and Multilateral Organizations: Cooperating and Collaborating."

## DAFTAR PUSTAKA

- AGENCY, AFP NEWS. 2019. *Saudi Arabia takes over G20 presidency from Japan*. December 1. <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/saudi-arabia-takes-g20-presidency-japan-191201111457831.html>.
- Astuti, W., & Fathun, L. (2020). Indonesian Economic Diplomacy in the G20 Economic Regime during the Administration of Joko Widodo. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 5(1), 47-68. doi:10.24198/intermestic.v5n1.4
- Bernes, Tom, and dkk. 2020. *Challenges of Global Governance Amid the COVID-19 Pandemic*. New York: Council on Foreign Relations.
- Chaudhury, Dipanjan Roy. 2016. *G20's achievements for global economy since the 2008 crisis*. September 9. <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/g20s-achievements-for-global-economy-since-the-2008-crisis/articleshow/54251577.cms?from=mdr>.
- Detiknews. 2019. *Indonesia Terima 16 Permintaan Pertemuan Bilateral di Sela KTT G20*. Juni 26. <https://news.detik.com/berita/d-4601315/indonesia-terima-16-permintaan-pertemuan-bilateral-di-sela-ktt-g20>.
- European Commision. 2020. *Coronavirus Global Reponse Pledging Conference*. May 4. [https://ec.europa.eu/international-partnerships/events/coronavirus-global-reponse-pledging-conference\\_en](https://ec.europa.eu/international-partnerships/events/coronavirus-global-reponse-pledging-conference_en).
- G20. 2020a. *Extraordinary G20 Leaders' Summit: Statement on COVID-19*. Riyadh: G20.
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020c. *Communiqué [18 July 2020]*. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020a. *Communiqué: Realizing Opportunities of the 21st Century for All*. Riyadh: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. 2020b. *Statement on COVID-19*. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
- G20. 2020b. *G20 Information Centre*. April 16. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-covid-funding-0416.html>.
- . 2020c. *G20 Information Centre*. April 24. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-covid-0424.html>.
- . 2020d. *Saudi G20 Presidency Welcomes the Launch of "Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator" Initiative*. April 26. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-act-0426.html>.
- Guebert, Jenilee. 2010. "The G8, G20 and Multilateral Organizations: Cooperating and Collaborating." *Studia Diplomatica* (Egmont Institute) 63 No. 2: 53-69.
- Hajnal, Peter I . . . 2014. *The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation*. Surrey/Burlington: Ashgate Publishing, Ltd.
- IMF. 2016. *Factsheet: IMF's Response to the Global Economic Crisis*. March 22. <https://www.imf.org/external/np/exr/facts/changing.htm?links=false>.
- . 2020. *Remarks by IMF Managing Director Kristalina Georgieva During an Extraordinary G20 Leaders' Summit [Press Release]*. March 26. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-georgieva-0326.html>.
- IMF. 2020. *World Economic Outlook Update, June 2020*. Washington, D.C.: IMF.
- Kirton, John J. 2016. *G20 Governance for a Globalized World*. New York: Routledge.

- Kirton, John. 2020. *Steady As She Goes: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors in July 2020*. July 18. <http://www.g20.utoronto.ca/analysis/200718-kirton-finance.html>.
- Kompas. 2020. *Erick Thohir: Bantuan Rp 2,4 Juta Per UMKM Disalurkan dalam 1-2 Minggu ke Depan*. Agustus 10. <https://money.kompas.com/read/2020/08/10/203000526/erick-thohir--bantuan-rp-2-4-juta-per-umkm-disalurkan-dalam-1-2-minggu-ke>.
- Lamont, Christopher, and Mieczyslaw P. Boduszynski. 2020. *Research Methods in Politics and International Relations*. London: SAGE Publications Ltd.
- Mardianis. 2013. "'Hard Law" dan "Soft Law" dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia." *Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan (LAPAN)* 1-19.
- MIKTA. 2020. "MIKTA Foreign Ministers' Joint Statement on the COVID-19 Pandemic and Global Health." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. april 9. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1209/pidato/mikta-foreign-ministers-joint-statement-on-the-covid-19-pandemic-and-global-health>.
- OECD. 2020. *Real GDP forecast*. July 23. <https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm>.
- Rood, Jan. 2014. *Transnational Governance and Democratic Legitimacy: The Case of the G20 and Financial-Economic Cooperation*. The Hague: The Hague Institute for Global Justice/ Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Schirm, Stefan A. 2011. *The G20, Emerging Powers, and Transatlantic Relations*. Washington, D.C.: German Marshall Fund of the United States, 3-5.
- Welch, David A. 2019. *Are G20 Summits Worth It?* July 3. <http://www.g7g20.utoronto.ca/comment/190703-welch.html>.
- World Bank. 2020. *COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II [Press Release]*. June 8. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>.
- . 2020. *Remarks to G20 Leaders' Virtual Summit [Press Release]*. March 26. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-malpass-0326.html>.